

**SEKOLAH VERSUS PESANTREN
SEBUAH PERBANDINGAN MENUJU FORMAT BARU MAINSTREAM LEMBAGA
PENDIDIKAN NASIONAL PENIADA DIKOTOMIK**

Oleh: Amrizal, MA.

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

Abstract

Sekolah-Pesantren is an ideal educational institution for Indonesia that was carried into the new mainstream Indonesian national education system. Integrating and choices of both institutions is done because it has a fundamental difference conflicting; sekolah has an advantage in the development of science and technology but failed in the moral and character development, while pesantren, on the contrary, is known to have experience and success in coaching morale and akhlak of the it's student but not capable in developing science and technology. Praxis sekolah-pesantren rests on the basic concept of human. The formulation of the vision, mission, and goals sekolah-pesantren is so likewise with the technique and metode used in the learning process, all remain within the framework of development and empowerment of students' potentials as human beings. Thus, sekolah-pesantren are expected to become an ideal educational institution nondikotomik.

Keyword; *Sekolah-Pesantren*

A. Pendahuluan

Kecerdasan bangsa adalah aset utama bangsa untuk melestarikan bangsa itu sendiri. Apa pun yang dimiliki oleh suatu bangsa; kekayaan alam, sosial dan budaya misalnya, tidak akan ada artinya bila pengelolaannya tidak dilandasi oleh kecerdasan. Demikian pula, apapun tujuan mulia negara bagi bangsanya tetap tidak akan pernah menjadi kenyataan bila tidak dilaksanakan dengan kecerdasan. Kecerdasan adalah kunci pemecahan masalah, dan kecerdasan hanya dapat ditingkatkan melalui pendidikan.¹ Tidak dapat dipungkiri, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dimulai secara nyata dari adanya kecerdasan dari sejumlah warga negara Indonesia, dan kecerdasan itu dapat berfungsi setelah disentuh oleh pendidikan. Kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya pendidikan dapat dilihat dari amanat yang telah dikeluarkan melalui pembukaan UUD 1945 alenia ke-4. Berikut petikannya:²

" Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Kesadaran bangsa Indonesia akan arti penting pendidikan tersebut, ternyata belum diringi dengan kecerdasannya dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Sistem pendidikan yang diselenggarakan selama ini sangat bersifat dikotomik; pendidikan umum (SD, SLTP, SMU, SMK, Universitas umum, dan lain-lain) versus pendidikan keagamaan (MI, MTs, MA, Pesantren, pelajaran umum versus pelajaran agama; sampai kepada penyelenggara pendidikan antara Departemen Pendidikan Nasional yang menyelenggarakan pendidikan umum dan Departemen Agama yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan.

Praktek sistem pendidikan dikotomis, telah memberikan implikasi begitu jauh terhadap output pendidikan; pendidikan agama telah menghasilkan manusia yang dikaruniai rasa ketaatan yang sangat besar, sedangkan pendidikan umum melahirkan sosok manusia yang beranggapan bahwa tidak ada batasan atau akhir dari kemungkinan-kemungkinan di dalam dirinya, atau dia dapat membentuk sendiri kehidupan yang dijalaninya tanpa tuntunan Ilahi.³ Dengan demikian, apa yang dikehendaki seperti yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional, "...mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya,..." tidak akan pernah tercapai.

Dalam konteks ini, Abdul Munir Mulkhan⁴ mengemukakan bahwa hingga hari ini, dunia pendidikan dan gerakan-gerakan Islam dalam berbagai konsentrasi dan aliran sulit menumbuhkan tradisi intelektual kritis sebagai etika dasar penafsiran terhadap kedua sumber teks utama Islam (al-Quran dan al-Hadits) yang seharusnya terus dilakukan. Dalam konteks dunia pendidikan di Indonesia, beliau menunjuk seperti (1) pesantren yang masih terus bersikukuh mempertahankan temuan ilmiah ulama klasik, (2) madrasah dan sekolah Islam terus menghadapi dilema di antara mempertahankan tradisi klasik dan kebutuhan umat terhadap pengetahuan objektif bagi kepentingan hidup kontemporer, (3) IAIN sebagai lembaga pendidikan tinggi masih sibuk dengan pemahaman temuan ilmiah ulama salaf dan mentradisikannya. Sehingga, menurut Mulkhan, sangat sulit diharapkan bisa melahirkan pemikir-pemikir orisinal tentang bagaimana Islam memandu dunia dan memecahkan berbagai masalah sosial. (4) Sekolah umum sampai perguruan tinggi umum tidak berhasil memberi bimbingan etika bagi siswa dan mahasiswanya dalam menghadapi kehidupan modern yang materialistik dan kapitalistik. Di samping itu, pelajaran agama yang diberikan juga tidak memberi peluang bagi tumbuhnya pemikiran kritis.

Menurut Mulkhan,⁵ dikotomi pendidikan tersebut telah menghadapkan anak-anak Muslim pada pertentangan-pertentangan tanpa jembatan penyelesaian. Guru dan dosen biologi, fisika dan kimia serta ilmu sosial dan kealaman lainnya terus mengajar bahwa alam natural dan alam sosial memiliki mekanisme sendiri untuk ada, tumbuh dan berkembang. Sedangkan pada jam sebelum atau sesudah itu, guru dan dosen agama Islam terus mengindoktrinisasikan bahwa semuanya merupakan ciptaan Allah dan bergerak, tumbuh, dan berkembang berdasarkan hukum Tuhan yang diberitakan dalam al-Quran dan al-Hadits.

Upaya untuk menghilangkan atau menghapus praktek dikotomik antara sekolah umum dan sekolah agama, sudah banyak dilakukan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu telah memasukkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran yang harus diajarkan di sekolah, tetapi alokasi waktu yang diberikan sangat minim, yaitu dua jam seminggu. Memang ada usaha-usaha yang dilakukan oleh Departemen Agama untuk menambah jam pelajaran menjadi enam jam per minggu pada tahun 1970, tetapi oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan usulan tersebut tidak disetujui.⁶

Untuk pendidikan di lingkungan madrasah dan pesantren, Departemen Agama telah berusaha untuk tidak mempertajam perbedaan antara pelajaran agama dan pelajaran umum, yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Dikbud dan Menteri Dalam Negeri tahun 1975. Kurikulum Madrasah yang baku dari Departemen Agama tentang perbandingan mata pelajaran umum dan pelajaran agama 70 % : 30 %.⁷ Namun, oleh Mukti Ali pembagian demikian dinilai juga masih sekuler.

Untuk pendidikan tinggi (baca: IAIN), Departemen Agama juga sudah berupaya memperkecil, jika tidak menghilangkan, dikotomi yang ada. Setidak-tidaknya terdapat dua langkah signifikan yang telah dilakukan.⁸ **Pertama**, memperkenalkan dan memperbanyak mata kuliah umum seperti filsafat umum, sosiologi, perbandingan agama, statistik, dan lain-lain dalam kurikulum nasional IAIN. Tujuan upaya ini selain untuk mendekatkan "ilmu-ilmu agama" dan "ilmu-ilmu umum", juga agar mahasiswa IAIN tidak terbelenggu dalam kerangka dan pendekatan normatif dalam memahami agama, sebagaimana lazim dalam "ilmu-ilmu agama". Dengan begitu, diharapkan mahasiswa IAIN juga mampu berpikir dan menggunakan pendekatan sosiologis dan historis dalam memahami agama.

Kedua, mendirikan dan mengembangkan jurusan-jurusan umum seperti jurusan Pedagogi, Jurusan Bahasa Inggris, Jurusan Bahasa Indonesia, Jurusan Sosial Kemasyarakatan, dan lain pada dasawarsa 1970-an. Pada akhir 1970-an sebagian jurusan-jurusan ini dilikuidasi dan sejak 1980-an digantikan jurusan Tadris (pengajaran) seperti Tadris IPA, Tadris Matematika, Tadris Biologi, dan sebagainya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut ternyata belum mampu menghilangkan praktek dikotomi tersebut. Karena, ketika kebijakan dan keputusan dibuat, para pengambil kebijakan sendiri belum mampu menghilangkan pandangan dikotomis tersebut dalam dirinya. Misalnya, dalam pembentukan dan pengembangan jurusan-jurusan umum dan kemudian Tadris, lebih didorong oleh kalangan IAIN dan Departemen Agama untuk memenuhi kebutuhan penyediaan guru-guru madrasah dalam bidang-bidang umum tersebut.⁹ Oleh karena itu, wajar kalau kita melihat dunia pendidikan kita masih menghasilkan lulusan yang memiliki pribadi

"pecah" dan, atau setengah-setengah dalam menguasai IPTEK dan IMTAQ atau hanya menguasai salah satunya.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka tulisan ini mencoba menawarkan sebuah bentuk lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik peniada dikotomik, yaitu dengan memadukan sistem pendidikan sekolah dan sistem pendidikan pesantren setelah melakukan kajian dan perbandingan tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing.

B. Sekolah dan Pesantren : Sebuah Perbandingan

Dengan kecerdasan dan teknologi, manusia modern seharusnya lebih bijak dan arif. Tapi kenyataannya banyak manusia yang kualitas kehidupannya lebih rendah di bandingkan dengan kemauan berpikir dan teknologi yang dicapainya. Maju tanpa dapat dihentikan itu, menyebabkan sebagian besar manusia modern terperangkap dalam situasi yang menurut istilah psikolog humanis terkenal, Rollo May, sebagai “ *manusia dalam kerangkeng* “, satu istilah yang menggambarkan salah satu derita manusia modern.¹⁰ Dengan demikian dapat dikatakan, di satu sisi manusia modern telah mencapai perkembangan dan kemajuan peradaban yang optimal, namun di sisi lain mengalami kemunduran akibat hilangnya nilai-nilai ilahiyah dalam dirinya, sebagai nilai kontrol setiap aktivitas yang dilakukan, sekaligus pembawa ketenangan jiwa.

Kondisi di atas, menurut Adimassana, merupakan implikasi dari sistem pendidikan sekolah yang dikelola oleh pemerintah (baca: Depdiknas) yang kurang menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai luhur (aspek rohani) yang menjadi motor penggerak perkembangan peserta didik ke arah hidup yang lebih manusiawi.¹¹ Adanya kenakalan remaja, tawuran antar pelajar, terlibatnya siswa dengan obat-obatan terlarang, minuman keras, pergaulan bebas, dan sebagainya dinilai sebagai kegagalan pihak sekolah dalam menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak ke dalam diri siswa. Itu berarti, pendidikan agama yang dua jam, serta pendidikan moral dan pendidikan nilai lainnya yang diberikan sekolah tersebut hampir tidak memberikan pengaruh apa-apa pada diri peserta didik.

Selama ini, pendidikan agama di sekolah dirasakan sebagai sesuatu keharusan belaka, bukan suatu yang diinginkan sebagai unsur dalam pembentukan kepribadian peserta didik.¹² Seluruh jenis pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, kecuali pendidikan keagamaan, lebih mementingkan aspek kognitif, sedangkan aspek afektif seperti kecerdasan emosional (*Emotional Quotien: EQ*) dan aspek psikomotorik, serta sistem nilai (*value system*) sangat diterlantarkan.¹³ Padahal, menurut hasil penelitian Daniel Goleman menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual (*Intellectual Quotien*) : *IQ*) hanya berkontribusi 20% terhadap keberhasilan seseorang, sedangkan 80 % lagi ditentukan oleh kecerdasan emosional (EQ).¹⁴ Bahkan menurut Ari Ginanjar Agustian IQ dan EQ saja belum cukup untuk membuat seseorang benar-benar sukses dalam kehidupannya.

Ada nilai-nilai yang tidak bisa kita pungkiri keberadaannya yaitu kecerdasan spiritual (*Spiritual Quotient : SQ*). IQ memang penting yaitu agar manusia bisa menciptakan dan memanfaatkan teknologi demi efisiensi dan efektivitas. EQ juga penting dalam membangun hubungan antar manusia sekaligus meningkatkan kinerja. Namun tanpa SQ maka keberhasilan itu hanyalah akan menghasilkan “*Hitler-Hitler* atau *Firaun-Firaun* “kecil di muka bumi.¹⁵

Oleh karena itu, banyak peserta didik yang paham tentang nilai-nilai keagamaan tetapi mengalami kesulitan untuk mendemonstrasikan dalam perilaku sehari-hari yang merupakan cerminan dari apa yang mereka ketahui secara kognitif tentang ajaran agama. Banyak peserta didik yang paham tentang pelajaran fisika, matematika, biologi, ekonomi, antropologi, dan sebagainya, tetapi mereka belum bisa menghayati untuk apa ilmu-ilmu itu dalam kehidupan nyata.

Kebalikan dari sistem pendidikan sekolah, pesantren, salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam, dikenal sebagai lembaga pendidikan yang mampu melahirkan santri-santri (peserta didik) yang menguasai ilmu-ilmu agama serta menghayati dan mengamalkan ajaran-ajarannya dengan ikhlas, memiliki akhlak yang luhur, berjiwa besar, hidup sederhana, dan lain sebagainya. Karena semuanya itu memang menjadi fokus dan tujuan dari pendidikan pesantren itu sendiri.¹⁶ Kelemahannya adalah persis yang tergambar dalam dialog antara Iqbal dan guru spiritualnya, Rumi. Berikut petikannya:

*Pikiran-pikiranku yang menerawang tinggi telah mencapai langit
Tapi di bumi aku terhina, kecewa, dan sekarat
Aku tak mampu menangani persoalan-persoalan dunia ini
Dan aku senantiasa menghadapi batu-batu penarung di alam ini
Mengapa urusan-urusan dunia terlepas dari kontrolku
Mengapa si “alim dalam agama ternyata awam dalam persoalan dunia ?*

Rumi tanpa pikir panjang menjawab:

*Seseorang yang mengaku dapat berjalan di langit
Mengapa harus sukar baginya melangkah di bumi*

Dari dialog di atas, dalam konteks pesantren dapat dijelaskan bahwa; *pertama*, santri yang dilahirkan pesantren adalah santri yang ‘alim dalam soal agama tapi “dungu” dan bingung apabila dihadapkan dengan persoalan dunia. Padahal untuk menguasai dunia, “ilmu-ilmu umum” merupakan prasyarat yang harus dimiliki. *Kedua*, pemahaman “ulama” yang menjadi target atau tujuan pendidikan pesantren harus ditinjau ulang. Siapa sebenarnya ulama yang dimaksud oleh Al-Quran. Al-Quran telah menyatakan bahwa “ yang paling takut kepada Allah di antara hambaNya adalah para ulama. Ternyata, permulaan ayat tersebut memberi konotasi bahwa “ulama” yang dimaksud ayat tersebut adalah ilmuan-ilmuan ilmu kealaman yang mau melakukan perenungan di dalamnya.¹⁷

Dengan demikian, masing-masing lembaga pendidikan nasional tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan yang saling bertentangan. Namun yang pasti, secara konseptual keduanya bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam Islam, tujuan pendidikan tersebut adalah menjadikan peserta didik sebagai *'abduallah* dan khalifah Allah yang mampu mengembangkan segenap potensi kehidupannya, sehingga ia dapat memperoleh keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, perpaduan sistem pendidikan sekolah dan sistem pendidikan pesantren dalam satu lembaga pendidikan merupakan salah satu solusi dari permasalahan yang dihadapi.

C. Sekolah Pesantren : Forman Baru Mainstream Lembaga Pendidikan Nasional

Lembaga pendidikan adalah suatu bentuk organisasi yang mempunyai pola-pola tertentu dalam memerankan fungsinya, serta mempunyai struktur tersendiri yang dapat mengikat individu yang berada dalam naungannya, sehingga lembaga ini mempunyai hukum tersendiri.

Lembaga pendidikan sekolah-pesantren merupakan lembaga pendidikan formal. Ia hadir sebagai lembaga struktural baru yang akan menjalankan peran dan fungsi sosialnya secara terpadu. Dalam konteks ini, ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu *struktural-fungsional* dan *mikro-interpretif*. *Pertama*, menempatkan lembaga pendidikan sekolah-pesantren sebagai subsistem sosial yang memiliki keterpautan timbal balik dengan keseluruhan sistem sosial masyarakat sebagai totalitas sosial. *Kedua*, menempatkan lembaga pendidikan sekolah-pesantren sebagai entitas sosial yang tidak dapat begitu saja disamakan dengan masyarakat luas. Karena, dalam pendidikan sekolah-pesantren terjadi suatu hidup bersama dari individu-individu yang memiliki peran, status, dan profesi yang tidak dapat disamakan begitu saja dengan peran, status, profesi yang telah ada dalam masyarakat.

Dengan demikian, lembaga pendidikan sekolah-pesantren harus ditempatkan dalam konteks masyarakat umum sebagai konteks jauhnya dan masyarakat sekolah sebagai konteks dekatnya. Ia dipandang sebagai institusi sosial yang khas, sekaligus sebagai salah satu sistem sosial yang korelatif dengan institusi dan sistem sosial lainnya dalam keseluruhan bangunan masyarakat yang pluralistis dan pluriform ini.

Sebagaimana pendidikan sekolah, diharapkan pendidikan sekolah-pesantren menjadi *mainstream* sistem pendidikan nasional. Artinya, di samping dapat dikelola oleh pihak swasta, lembaga ini dikelola oleh pemerintah, namun ia harus bebas dari segala macam upaya untuk menjadikannya sebagai perpanjangan dari suatu power institusional yang ada, betapapun simbolnya bernada demokratis. Oleh karena itu, peranan dan fungsi sekolah-pesantren tidak hanya sebagai tempat latihan mempersiapkan tenaga siap pakai, melainkan juga sebagai tempat teradinya proses penyadaran diri agar peserta didik kemudian siap tahu dan siap sadar.

Pendidikan sekolah-pesantren merupakan perpaduan antara pendidikan sekolah dan pendidikan pesantren. Ia dikembangkan berdasarkan beberapa prinsip sebagai berikut; *pertama*, sekolah-pesantren merupakan pendidikan sekolah berasrama (*boarding school*). Dengan sistem asrama akan mempermudah mencapai tidak hanya tujuan-tujuan akademik tetapi juga komitmen keagamaan dan kepribadian yang matang. *Kedua*, melaksanakan pendidikan secara berkelanjutan selama enam tahun, mulai dari tingkat SLTP sampai tingkat SMU seperti dilaksanakan oleh pesantren pada umumnya. Dengan konsep seperti ini akan diraih kesinambungan pendidikan, khususnya dalam aspek kurikulum yang lebih pasti. Karena pengulangan materi pada jenjang berikutnya akan dapat dihindari.

Ketiga, pendidikan sekolah-pesantren memadukan antara pelajaran “umum” dan “agama” secara seimbang dan proporsional. Hal itu tentu akan menambah beban bagi peserta didik, namun bisa diminimalisir dengan adanya intergrasi dan penyesuaian kurikulum antara kedua jenjang. Pada tingkat SLTP diberikan mata pelajaran-mata pelajaran dasar umum (MPDU), dan muatan materi yang diberikan benar-benar praktis, operasional, dan realistik untuk kehidupan keseharian peserta didik. Adapun pada tingkat SMU mulai diberikan penjurusan sesuai dengan bakat, minat, dan tingkat kemampuan peserta didik. Dalam konteks tersebut, kelas III merupakan seleksi akhir bagi peserta didik untuk menentukan di jurusan mana mereka akan ditempatkan. Namun, hal itu bukan UAN seperti adanya sekarang, melainkan tetap dalam konteks Evaluasi Belajar Kenaikan Kelas (EBKK). Dengan demikian, di sini terlihat signifikansi kesinambungan jenjang pendidikan antara SLTP dan SMU.

D. Murid dalam Pandangan Sekolah-Pesantren

Pendidikan sekolah-pesantren merupakan pendidikan yang menjadikan konsep manusia sebagai dasar pendidikannya. Dengan demikian, ia merupakan lembaga pendidikan yang memahami peserta didik sebagai manusia. *Pertama*, ia memandang peserta didik sebagai makhluk yang terkomposisi atas jiwa dan raga yang saling berhubungan dan saling menunjang dan tidak dapat dipisahkan.¹⁸ Dalam perspektif Islam, jiwa lebih utama dari raga, karena raga hanyalah alat jiwa di alam nyata. Ketika jiwa berpisah dari raga itulah yang disebut peristiwa maut. Yang mati adalah raga, sedangkan jiwa akan melanjutkan eksistensinya di alam barzakh.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut, maka pendidikan jiwa harus mendapat proporsi yang wajar dengan tidak mengabaikan pendidikan raga dan akal apalagi menghilangkannya. Dalam artian, pendidikan “agama” mendapat tempat yang layak dan menjadi pengetahuan dasar yang utama, dengan tidak mengenyampingkan pelajaran-pelajaran eksakta dan sosial, dan lain sebagainya. Kesemuanya harus berjalan serasi, berkesinambungan dan integral antara satu dengan lainnya. Meskipun,

secara mikro semua materi tersebut memiliki titik tekannya sendiri, namun secara makro, semua materi tersebut harus memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara satu dengan lainnya.

Dengan demikian, lembaga pendidikan pesantren memiliki muatan material dan spiritual yang mempersiapkan peserta didik hidup dinamis baik bagi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, tidak hanya berorientasi pada ilmu-ilmu kontemporer tetapi juga berorientasi pada ilmu-ilmu “agama”. Dengan muatan seperti itu, menurut Kuntowijoyo, akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghadapi kehidupannya secara aktif dan dinamis, lewat tuntunan ilahiyah, bukan bersifat pasif dan konservatif yang fatalis.²⁰

Kedua, Di samping sebagai makhluk dua dimensional, jiwa dan raga, pendidikan pesantren juga memandang sekaligus menghargai peserta didik sebagai makhluk individual sosial. Sebagai makhluk individu, peserta didik adalah seorang individu tertentu yang merupakan kesatuan tak terbagi, unik, dan otonom.²¹ Sebagai seorang individu, tugas dan tanggungjawab serta panggilan pertamanya adalah belajar menjadi seorang yang bertanggungjawab untuk dirinya sendiri, bukan yang lain. Itulah jalan kemandirian, pemberdayaan, kemerdekaan, dan kedaulatan diri. Itulah jalan menuju sehat secara psikologis-spiritual.²²

Untuk menjadi dirinya sendiri, peserta didik harus diberi kesempatan untuk belajar menumbuhkembangkan keberanian untuk menyatakan perbedaan dan bukan memaksanya untuk menyamakan diri atau meniru-niru orang lain. Belajar menjadi pemberani dalam arti menerima perbedaan sebagai sesuatu kenyataan yang wajar dan manusiawi, serta pantas disyukuri dan bukan disesali, apalagi ditiadakan. Peserta didik juga dididik untuk mengatasi kecenderungan untuk bersikap reaktif dengan melempar tanggungjawab dan suka mencari kambing hitam (*excuses*), juga harus dididik untuk berani menghadapi kesulitan-kesulitan dalam menunaikan setiap pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Ia juga harus dididik untuk mengakui kesalahan dan kekhilafannya, berani bertindak sesuai dengan hati nuraninya, berani menyatakan apa yang diyakinnya sebagai benar, berani menerima dirinya (*self acceptance*), menghargai diri (*self respect*), mempercayai dirinya (*self Confidence*), dan mengarahkan dirinya (*self direction*) untuk otentik dan sejati atau menjadinya sendiri (*be him/her self*), mengekspresikan diri sepenuhnya, seutuh-utuhnya, apapun resiko dan konsekuensinya.²³

Berdasarkan hal tersebut, proses pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik, kegiatan belajar dalam rangka mendapat informasi dan sebagainya lebih banyak dilakukan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik sudah mulai dilatih bersikap kreatif, mandiri, dan produktif, di mana sikap seperti itu sangat dibutuhkan dalam menghadapi masyarakat maju, yang pada gilirannya dapat menciptakan masyarakat belajar (*learning society*). Dengan demikian juga peserta didik menjadi subjek yang belajar, subjek yang bertindak dan berpikir, dan pada saat yang bersamaan berbicara menyatakan hasil tindakan dan buah pikirannya. Ia bukan sebagai objek.

Objeknya adalah realita. Maka hubungannya dengan pendidik adalah sama-sama subjek., bukan subjek-objek. Dengan begitu akan terciptalah suasana dialogis yang bersifat intersubjek untuk memahami objek bersama. Dari sinilah akan muncul pelbagai penemuan dan terobosan baru, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai makhluk individual peserta didik memang dapat berdiri sendiri. Tetapi keberadaannya selalu bersama dengan yang lain, karena ia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, individualitas manusia perlu dipahami dalam kaitan sosialitasnya, dan antara keduanya tidak boleh dipisahkan.²⁴ Dalam konteks ini, pendidik dapat membimbing peserta didik untuk bisa menghargai, menghormati, dan bekerja sama dengan temannya atau orang lain. Peserta didik dapat saling membantu dalam belajar (mengajar) sesama peserta didik lainnya. Bahkan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pengajaran oleh rekan sebaya (*peer teaching*) ternyata lebih efektif dari pada pengajaran oleh guru.²⁵

Ketiga, pendidikan sekolah –pesantren juga sangat menghargai peserta didik sebagai makhluk yang bebas. Kebebasan di sini dipahami sebagai kemampuan untuk menentukan diri, yakni kemampuan untuk mengambil sikap terhadap bermacam-macam pengaruh dan penentuan yang ada, termasuk kenyataan masa lampunya. Manusia disebut bebas bila ia dapat melepaskan diri dari segala sesuatu yang menghalangi perwujudan dirinya secara utuh.²⁶ Namun, kebebasan individu adalah kebebasan dengan tanpa menghilangkan atau merampas kemerdekaan dan kebebasan orang lain.

Dalam konteks pendidikan, kebebasan peserta didik bukan berarti melepaskan diri dari pendidik dan teman-temannya, dan hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Sebab, hal itu tidak manusiawi, tidak sportif, dan destruktif. Tetapi ia adalah kebebasan yang diciptakan oleh pendidik agar peserta didik memiliki kebiasaan bebas secara individu dan mendidiknya dengan pendidikan pembebasan agar mereka mempunyai kemampuan untuk menentukan kehidupannya tanpa harus tergantung pada orang lain.²⁷

Menurut St. Kartono,²⁸ pembelajaran tanpa kebebasan akan menghasilkan orang-orang muda yang serba gagu dan ragu untuk mengambil pilihan. Berdasarkan hal tersebut, maka tugas seorang pendidik adalah; *pertama*, mentradisikan peserta didik memikul tanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Peserta didik dibebaskan melakukan apa saja tanpa harus bergantung pada orang lain. *Kedua*, melibatkan peserta didik dalam mengatasi problema hidup agar pada saatnya di masyarakat ia telah memiliki keteguhan jiwa, semangat yang kuat, objektif, memiliki kekuatan iman, percaya diri, mampu melaksanakan tugas diri dan negaranya, dan selalu mantap dan sukses dalam hidupnya. *Ketiga*, tepat dan bijak dalam memuji peserta didik agar memiliki kepercayaan diri yang wajar dan sehat. Terlalu percaya diri mengisyaratkan bahwa orang tersebut sangat lemah. *Keempat*, jangan memperbanyak perintah dan larangan sebab hal itu akan

mematikan emosi dan kreativitas peserta didik. Sebab perintah dan larangan yang berlebihan sama artinya dengan pengendalian, penggiringan dan pengurangan kesempatan bagi peserta didik untuk berinisiatif, dan pada gilirannya peserta didik akan bergantung dan kurang percaya diri, bakat dan minatnya pun akan tumpul tak tergerak lagi. *Kelima*, pendidik hendaknya memperhatikan kemampuan riil peserta didik, kemudian mengarahkan dan memotivasinya menuju kesempurnaan jiwa dan skill.

Dengan demikian, peran pendidik sangat menentukan apakah proses pembelajaran tersebut dapat membebaskan atau tidak terhadap individu peserta didik untuk bisa mandiri dan menentukan jati diri kemanusiaannya. Hal ini akan berhasil apabila pendidik memahami dan sadar akan kebebasan sendiri-sendiri.

Keempat, lembaga pendidikan sekolah–pesantren juga memandang peserta didik sebagai makhluk yang menyejarah. Artinya; (1). sebagai makhluk yang sadar manusia dapat mengenal dan mengerti masa lampaunya dan dapat memanfaatkannya demi kehidupannya di masa sekarang dan yang akan datang. (2) sebagai makhluk yang berkehendak bebas yang dapat merancang hidupnya, sehingga kendati dipengaruhi masa lampaunya ia tetap mengambil sikap terhadapnya. Ia dapat menentukan dan menghidupi dirinya. (3) manusia berkembang dalam waktu, hidupnya tidak statis. Dalam hidupnya ia mengalami perubahan dan perkembangan.²⁹

Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran harus didasarkan pada fakta masa lampau peserta didik, baik perorangan maupun sebagai bangsa. Dari segi perorangan, peserta didik bukanlah suatu tabularasa sebagaimana dianggap oleh John Locks. Kelenturannya untuk dibentuk, daya tangkap dan daya tampungnya untuk diisi mengenali batas-batas tertentu. Unsur-unsur bawaan, baik dari segi biologis, psikologis, dan kerohanian akan cukup berpengaruh pada tingkat prestasi yang dapat dicapainya. Untuk dapat berkembang secara sehat, peserta didik perlu mengenali dan menerima masa lampaunya.

Dari segi bangsa, pembelajaran mesti membantu peserta didik untuk mengenali dan mengerti sejarah bangsanya. Pengenalan dan pengertian ini akan memantu mereka untuk menerima identitas diri bangsanya dan menumbuhkan semangat nasional yang sehat. Orang yang tercerabut dari akar budaya bangsanya sendiri akan menjadi kikuk dalam percaturan budaya internasional. Pengenalan dan pengertian sejarah bangsa sendiri juga akan membantu peserta didik untuk secara kreatif dan baru meneruskan tradisi yang diwarisinya.

Dengan berpijak kepada konsep dasar manusia tersebut, pendidikan sekolah pesantren akan mampu merespon tumbuh dan berkembangnya seluruh potensi peserta didik secara optimal lewat sentuhan ruh ilahi. Pengembangan sistem ini akan mampu pula menciptakan manusia akademik yang berkualitas baik secara intelektual maupun keimanannya. Dengan berpegang pada sistem ini, diharapkan akan mampu menciptakan peserta didik yang peka dan

bertanggungjawab, baik secara vertical maupun horizontal. Pola ini akan mampu menciptakan individu yang memiliki kepribadian paripurna, yaitu pribadi integral antara agama dan ilmu pengetahuan.

E. Tujuan Pendidikan Sekolah-Pesantren

Sebagai sebuah sistem yang akan menjadi *mainstream* sistem pendidikan nasional, formulasi tujuan pendidikan sekolah-pesantren harus merujuk pada tujuan pendidikan nasional, secara integral dan terpadu, bukan secara parsial dan cenderung menyempit seperti tujuan sekolah dan pesantren selama ini. Berikut ini petikan tujuan pendidikan nasional kita.

Secara konseptual, formulasi tujuan pendidikan nasional di atas sesuai dengan amanat kongres Pendidikan Islam sedunia tahun 1980 di Islamabad, yang menyebutkan bahwa pendidikan Islam haruslah bertujuan mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang menyeluruh, secara seimbang, melalui latihan jiwa, intelek, diri yang rasional, perasaan dan indra. Karena itu, pendidikan harus mencapai pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya; spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, dan bahasa secara individual dan kolektif. Mendorong semua aspek ke arah kebaikan dan mencapai kesempurnaan. Tujuan akhirnya adalah dengan perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT. baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia.³⁰

Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional di atas dinilai sangat ideal. Di katakana ideal karena telah menyentuh berbagai aspek dasar yang ada pada diri manusia (peserta didik), yaitu aspek rohaniah, jasmaniah, dan akal. *Pertama*, pendidikan rohaniah merupakan pendidikan yang akan mampu menghubungkan peserta didik dengan khaliqnya. Dari sini akan lahir peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Iman dan taqwa akan melahirkan peserta didik yang *berakhlak al-karimah*, yaitu peserta didik yang memiliki sikap dan tingkah laku yang mulia. *Kedua*, pendidikan jasmani erat kaitannya dengan tugas manusia sebagai *khalifah fi al-ardh*. Dalam melaksanakan tugasnya, manusia senantiasa berinteraksi secara aktif dengan lingkungan di mana ia berada. Agar tugasnya bisa terlaksana dengan baik, manusia harus memiliki jasmani yang sehat dan kuat. Upaya tersebut adalah dengan memberikan sejumlah ketrampilan fisik yang dapat menumbuhkan dan membangun jasmaninya yang sehat. *Ketiga*, pendidikan akal yang dapat mengembangkan intelegensia (kecerdasan otak peserta didik). Dengan kecerdasannya, peserta didik akan mampu menganalisa dan memahami berbagai fenomena yang ada, sehingga mampu mendapatkan kebenaran yang sebenarnya. Dengan kecerdasannya juga, peserta didik akan mampu menemukan berbagai teknologi yang mampu membantunya mengelola dan memanfaatkan alam untuk kepentingan hidupnya.³¹

Semua aspek yang ada dalam formulasi tujuan pendidikan nasional tersebut juga harus ada dalam formulasi pendidikan sekolah-pesantren secara utuh dan terpadu. Ia berjalan seimbang dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Sebab, bila salah satu aspek tersebut diabaikan keberadaannya, seperti kebanyakan lembaga pendidikan kita saat ini, akan berimbas pada aspek lain, dan eksistensi manusia sebagai pengemban amanat Allah akan sulit untuk bisa dilaksanakan.

Dengan demikian, pendidikan sekolah-pesantren merupakan sistem pendidikan yang tidak mengenal dikotomik parsial. Semua aspek dasar yang ada dalam diri peserta didik dibina dan dikembangkan secara harmonis dan menyatu dalam satu visi. Bagaimapun formulasi tujuannya, yang terpenting adalah tidak mengabaikan salah satu dari aspek-aspek dasar tersebut.

F. Kurikulum Sekolah-Pesantren

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan disain kurikulum sekolah-pesantren yang proporsional dan dinamis. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. *Pertama*, muatan kurikulum sekolah-pesantren harus dapat merangkul semua dimensi dan aspek dasar peserta didik. Dalam konteks ini, materi kurikulum pendidikan sekolah-pesantren tidak didominasi oleh pendidikan “umum”: seperti yang berlaku pada pendidikan sekolah selama ini dan juga tidak melulu pelajaran-pelajaran “agama” seperti dipraktekkan banyak pesantren, tetapi perpaduan antara keduanya secara proporsional dan dinamis sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat peserta didik. Tidak hanya sampai di sini, seluruh mata pelajaran harus mampu mencerminkan pesan moral nilai keilmuan religius.³² Untuk itu, masing-masing mata pelajaran harus dikaitkan antara satu dengan lainnya. Misalnya, mata pelajaran agama yang selama ini sangat menekankan pada dimensi teologis dan ritual, mulai dijelaskan dari sudut pandang ilmu yang lain seperti ekonomi, politik, filsafat, antropologi, psikologi, dan sebagainya. Contoh lain, pelajaran IPA misalnya, bagaimana konsep fisika tentang penciptaan alam semesta juga dikaitkan dan dibandingkan dengan pelajaran “agama” (baca: Al-Quran).³³ Kemudian mata pelajaran IPS tidak hanya berhenti pada menjelaskan dan mengubah fenomena sosial melainkan mampu mengubah fenomena berdasarkan cita-cita etik dan profetik yang didasarkan kepada tiga hal, yaitu kemanusiaan, liberalisasi, dan transendensi. Dengan prinsip seperti itu diharapkan mampu menghilangkan pemikiran sekaligus praktek dualisme dikotomi dalam sistem pendidikan nasional kita. Begitu juga, muatan kurikulum seperti ini akan dapat mempersiapkan peserta didik untuk bisa hidup secara dinamis baik bagi kehidupan dunia maupun bagi kehidupan akhirat.

Kedua, kurikulum sekolah-pesantren harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat, dan juga harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Karena setiap saat ilmu pengetahuan terus berkembang baik menghasilkan suatu teori/ hukum baru maupun menggugurkan teori/hukum yang ada.³⁴ Sehingga pasti ada teori/hukum yang sudah usang dan tidak relevan lagi untuk disampaikan kepada peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum

yang ada harus selalu ditinjau ulang. Dalam konteks ini, kaedah yang diperkenalkan dunia pesantren, *al Muhafazhah 'ala al qadim al shalih wa al akhzhu bi al jadid al ashlah'* memelihara nilai-nilai klasik yang baik dan terus menggali nilai-nilai baru yang lebih konstruktif, bisa dijadikan sebagai dasar dalam mengadakan inovasi kurikulum. Dengan demikian, kurikulum sekolah-pesantren akan senantiasa relevan dengan kehidupan peserta didik, bagaimanapun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pasti membawa pengaruh terhadap sikap dan minat, kebiasaan, dan pola hidup dalam masyarakat.

Ketiga, cakupan materi kurikulum sekolah pesantren hendaklah selaras dengan tingkat perkembangan fitrah peserta didik, baik fisik, psikis, sosial, budaya, maupun intelektual. Berdasarkan hal ini, pengembangan kurikulum tidak diarahkan untuk menciptakan satu kurikulum tunggal yang diberlakukan untuk semua peserta didik pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Kurikulum hendaknya dibedakan untuk anak-anak rata, di atas rata-rata, dan di bawah rata-rata, baik karena faktor bawaan atau karena ketersediaan sumberdaya pendukung. Pemberlakuan kurikulum yang berbeda tentu juga menyebabkan perbedaan cara mengukur tingkat pencapaian tujuan pembelajaran untuk setiap kelompok peserta didik tersebut.

Dalam konteks ini, kurikulum tidak hanya dipandang sebagai sejumlah mata pelajaran dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di dalam kelas, tetapi meliputi semua pengalaman peserta didik yang diperoleh di bawah pengarah lembaga (sekolah-pesantren).³⁵ Jadi, isi kurikulum sekolah-pesantren tidak hanya apa yang disebut dengan kegiatan kurikuler, tetapi juga kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler secara terpadu. Dengan konsep kurikulum seperti itu, diharapkan mampu menjadi penggerak dalam menumbuhkan keperibadian peserta didik sebagai intelektual muslim paripurna, baik sebagai *'abd* maupun sebagai *khalifah fi al ardh*.

Keempat, prinsip kesinambungan (kontinuitas), yaitu adanya saling keterkaitan antara tingkat pendidikan, jenis program pendidikan, dan bidang studi. Misalnya, bahan pelajaran yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut pada tingkat pendidikan lebih tinggi hendaklah sudah diajarkan pada tingkat pendidikan sebelumnya atau di bawahnya. Begitu juga, bahan pelajaran yang telah diajarkan pada tingkat pendidikan yang lebih rendah tidak harus diajarkan lagi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga terhindar tumpang tindih dalam pengaturan bahan dalam proses pembelajaran. Kemudian hubungan antara satu bidang studi dengan bidang studi lain juga harus mendapat perhatian. Masing-masing bidang studi tidak bisa dan tidak boleh berdiri sendiri.

Kelima, kurikulum sekolah-pesantren harus praktis dan fleksibel. Praktis artinya mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan biayanya juga murah. Fleksibel artinya bisa menampung berbagai kemungkinan perubahan di masa yang akan datang sebagai dampak perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum tidak boleh terlalu

rinci, sehingga dapat dikembangkan secara mandiri oleh para pendidik sesuai dengan potensi peserta didik setempat, keadaan sumberdaya pendukung, dan kondisi daerah setempat. Kurikulum hanya memberikan yang fundamental saja. Pengembangan yang sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat dicari sendiri oleh sekolah. Prinsip kurikulum seperti ini menjadi sangat relevan mengingat dunia saat ini begitu cepat berubah sehingga menjadi cepat usang.

Di samping prinsip-prinsip di atas, ada beberapa prinsip khusus yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum sekolah-pesantren. *Pertama*, berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Pada awalnya tujuan ini bersifat umum. Kemudian dalam operasionalnya tujuan yang bersifat umum tersebut dibagi menjadi bagian-bagian kecil, yang dikenal dengan tujuan pembelajaran khusus (TPK). Ia dirumuskan dalam bentuk rencana pengajaran (persiapan mengajar) yang selanjutnya mengarahkan perbuatan pembelajaran yang akan dilakukan secara bersama oleh pendidik dan peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus tersebut hendaknya menekankan dan memperhatikan, serta memenuhi segi perkembangan pribadi, integritas dan otonomi individu peserta didik. Karena setiap individu peserta didik memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari yang mendasar sampai pada kebutuhan yang paling tinggi. Menurut Benjamin S. Bloom, tujuan pendidikan (kurikulum) harus senantiasa mengacu pada tiga jenis domain (daerah binaan atau ranah) yang melekat pada diri peserta didik, yaitu: (1) ranah proses berpikir (*cognitive domain*); (2) ranah nilai atau sikap (*affective domain*), dan ranah ketrampilan (*psychomotor domain*).

Kedua, berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan peserta didik harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:³⁶ (1) materi yang disusun tidak menyalahi fitrah manusia; (2) isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. Ketiga ranah tersebut harus diberikan secara simultan dan urutan situasi belajar. Ia disusun dalam urutan yang logis dan sistematis; (3) disesuaikan dengan perkembangan dan usia peserta didik; (4) perlu membawa peserta didik kepada objek empiris, sehingga peserta didik mempunyai ketrampilan-ketrampilan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat mencari penghidupan yang layak; (5) materi yang disusun harus integral, terorganisir, dan terlepas dari kontradiksi antara materi satu dengan materi yang lainnya; (6) materi yang disusun mempunyai relevansi dengan masalah-masalah kontemporer dan relevan dengan tujuan Negara; (7) adanya metode yang mampu menghantarkan tercapainya materi pelajaran dengan memperhatikan perbedaan masing-masing individu; (8) materi yang disajikan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga bersifat praktis; (9) memperhatikan aspek-aspek sosial; (10) seluruh prinsip di atas haruslah dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. dengan penuh keikhlasan.

Ketiga, berkaitan dengan pemilihan proses pembelajaran. Dalam hal ini, proses pembelajaran yang dipilih harus mampu menyentuh seluruh dimensi dan potensi peserta didik secara utuh dan harmonis. Kesentuhan seluruh dimensi dan potensi yang dimiliki peserta didik akan mampu menumbuhkan satu bentuk kepribadian peserta didik secara utuh. Dengan keutuhan ini peserta didik akan dapat mengembangkan dirinya secara serasi dan seimbang, baik dalam perkembangan intelektual, emosional, maupun moral.

Untuk tujuan ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi; (1) tersedianya pendidik yang memiliki kompetensi profesional³⁷ yang tugasnya tidak hanya sebagai penyampai materi tetapi lebih dari itu, ia adalah sebagai sumber inspirasi “spiritual” dan sekaligus sebagai pembimbing sehingga terjalin hubungan pribadi antara pendidik dan peserta didik yang cukup dekat dan mampu melahirkan keterpaduan bimbingan rohani dan akhlak dengan materi pengajarannya. Dengan demikian pendidik di sekolah-pesantren tidak cukup hanya bermodal “professional” semata tetapi perlu didukung oleh kekuatan moral; (2) memiliki metode yang lebih menekankan peran aktif peserta didik. Dalam konteks ini, paradigma *teaching* (mengajar) yang digunakan selama ini sudah saatnya dirubah menjadi *learning* (belajar). Dengan perubahan ini proses pendidikan menjadi proses bagaimana belajar bersama antara pendidik dan peserta didik. Pendidik dalam konteks ini juga termasuk dalam proses belajar. Memang, pendidik tentu saja tetap dianggap lebih berpengalaman dan lebih banyak pengetahuannya, tetapi ia tidak memegang satu-satunya kebenaran. Sebab, kebenaran bisa saja datang para peserta didik. Jadi yang ingin dikembangkan oleh pendidikan sekolah-pesantren adalah proses pembelajaran *emansipatoris*, yaitu adanya hubungan yang berdasarkan kemitraan antara pendidik dan peserta didik.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang harus dilakukan pendidik adalah :³⁸

- (1) pendidik hendaknya bertindak sebagai *role model*, suri teladan bagi kehidupan sosial akademik peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas. Pendidik harus memberi contoh komitmen dan dinamika diri dalam kegiatan-kegiatan akademis dan sosial keagamaan, seperti membaca (baik dipergustakaan maupun di tempat lain), berdiskusi, meneliti, menulis, ataupun kegiatan-kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar (control social)* yang tercermin dalam ucapan dan tingkah laku sehari-hari.
- (2) Pendidik harus menunjukkan sikap kasih sayang kepada peserta didik; antusias dan ikhlas mendengar dan menjawab pertanyaan, serta menjauhkan sikap emosional dan feodal seperti cepat marah dan tersinggung. Karena pertanyaan peserta didik sering disalahartikan sebagai mengurangi wibawa.
- (3) Pendidik hendaknya memperlakukan peserta didik sebagai subjek dan mitra belajar, bukan objek. Pendidikan orang dewasa, *adult education*, yang menekankan belajar mandiri, kemampuan membaca, berpikir kritis, perlu ditingkatkan secara konsisten dalam proses

belajar mengajar. Sudah saatnya peserta didik mengupayakan iklim dialogis/interaktif di kelas terhadap peserta didik, dimulai dari tingkat dasar.

- (4) Peserta didik hendaknya bertindak sebagai fasilitator, *promotor of learning* yang lebih mengutamakan bimbingan, menumbuhkan kreativitas peserta didik, serta interaktif dan komunikatif dengan peserta didik. Sebagai pembimbing yang arif, pendidik hendaknya memanfaatkan interaksi dengan peserta didik sebagai proses peningkatan diri melalui feedback konstruktif dari peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian, sebuah metode yang cocok dengan paradigma pendidikan sekolah-pesantren mesti ditemukan untuk kemudian diterapkan. Apapun nama dan istilah metode tersebut tidak jadi soal, yang terpenting adalah; (1) apakah metode/teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran, (2) apakah metode/teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual peserta didik, (3) apakah metode/teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor, (5) apakah metode/teknik tersebut lebih mengaktifkan peserta didik, atau mengaktifkan pendidik, atau kedua-duanya, (6) apakah metode/teknik tersebut mendorong berkembangnya kemampuan baru.

Keempat, kaitannya dengan kegiatan penilaian. Secara umum, penilaian yang dilakukan selama ini cenderung hanya menyentuh satu aspek dari peserta didik, yaitu aspek kognitif (intelektual), dan itupun lebih berorientasi pada sejauh mana peserta didik mampu mengingat dan menghafal sekian banyak materi yang disampaikan pendidik. Sedangkan aspek lainnya, afektif (sikap) dan psikomotor (pengalaman) terabaikan dan bahkan sengaja diabaikan. Penilaian seperti ini berarti telah mengabaikan aspek-aspek peserta didik sebagai makhluk fisik dan psikis, dan hal itu akan memberikan akses-akses yang kurang menguntungkan dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan.

Dalam pendidikan sekolah-pesantren, penilaian terhadap peserta didik harus komprehensif, meliputi totalitas peserta didik sebagai pribadi. Dalam konteks ini, hasil belajar peserta didik tidak hanya dilihat dan, atau bersumber dari angka-angka tes yang dihasilkan di kelas, melainkan bagaimana sikap dan perilaku kesalehan yang diperlihatkan peserta didik dalam kesehariannya. Nilai 9 itu penting, tapi jauh lebih penting nilai 9 dalam sikap dan perilaku. Pada tataran inilah terlihat bagaimana signifikansi sistem asrama dalam pendidikan sekolah-pesantren, karena penilaian terhadap peserta didik dapat dilakukan selama 24 jam.

Dalam pendidikan sekolah-pesantren pendidik juga menjadi salah satu elemen, di samping peserta didik, yang harus dievaluasi, konteksnya dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Karena pendidik adalah salah satu faktor penentu keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Keberhasilan peserta didik dalam pendidikannya dinilai karena keberhasilan

pendidik dalam menciptakan situasi belajar yang menyenangkan, keberhasilan mereka dalam mengembangkan dan membina potensi peserta didik, di mana keberhasilan mereka tidak hanya dalam *transfer of knowledge* tetapi juga *transfer of value*, keberhasilan menjadi contoh teladan bagi anak didiknya, dan lain-lain. Sebaliknya, kegagalan peserta didik tidak terlepas dari kegagalan pendidik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Untuk menentukan faktor keberhasilan dan kegagalan tersebut perlu dilakukan penilaian. Faktor penyebab keberhasilan harus dipertahankan dan faktor penyebab kegagalan perlu dicari solusinya. Penilaian terhadap pendidik ini bisa melibatkan peserta didik, karena lebih representative dan objektif dibandingkan dengan penilaian yang dilakukan tenaga pengawas yang belum tentu sebulan sekali melakukan interaksi dengan pendidik.

Catatan Akhir

¹ Diana Nomida Musnir, "Arah Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Historis" Dalam Sindhunata (ed.) *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*, Yogyakarta, Kanisius, 2000, hal. 68.

² Sekretariat Negara, *UUD 1945, P4, dan GBHN*, Jakarta, PT. Mutiara Sakti Utama, 1985, hal. 1

³ Muhaimin, *Kontroversi Pemikiran Fazlurrahman: Studi Kritis Pembaharuan Pendidikan Islam*, Cirebon: Pustaka Dinamika, 1999, hal. 108.

⁴ Abdul Munir Mikhlan, *Etika Kritis Fazlurrahman*", dalam kata pengantar Syarif Hidayatullah, *Intelektualisme Dalam Perspektif Noe-Modernisme*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000, hal. Xxi-xxvi.

⁵ *Ibid.*

⁶ Karel A. Steenbrink, *Pesantre Madrasah Sekolah Dalam kurun Waktu Modren*, Jakarta, LP3ES, hal. 94.

⁷ Marwan Sarijo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, CV. Amisco, 1996, hal. 42.

⁸ Azyumardi Azra, "Pengelompokan Disiplin Ilmu " Ilmu Agama" perpektif IAIN" dalam M. Amin Abdullah, dkk., *Antologi Studi Islam Teori dan Metodologi*, Yogyakarta, Sunan Kalijaga Press, 2000, hal. 154.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Lihat dalam Akhmad Mubarak, *Jiwa dalam Al-Quran*, (Jakarta, Paramadina, 2000), hal. 3-4

¹¹ Y.B., Admassana, "Revitalisasi Pendidikan Nilai di Sektor Pendidikan Formal", dalam A. Aghmadi dan Y. Setyaningsih (ed.), *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ke Tiga*, (Yogyakarta, Kanisius), 2000, hal. 31.

¹² Lihat J. Drost, "Masalah IPA dan IPS" dalam Sindhunata (ed.), *Pendidikan : Kegelisahan Sepanjang Zaman*, (Yogyakarta, Kanisius, 2001), hal. 252.

¹³ Lihat Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi: Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*, (Yogyakarta, Adicita Karya Nusa, 2002), hal. 4.

¹⁴ Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar : Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Jakarta, Paradigma) , 2001, hal. 55-56.

¹⁵ Ari Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power*, (Jakarta, Arga, 2003), hal. 65.

¹⁶ Lihat Depag, *Standarisasi Pengajaran Agama di Pondok Pesantren*, tt., tp., 1981, hal. 6.

¹⁷ Lhat Q.S. Fathir : 27-28)

¹⁸ Imam Barnadib, "Renungan Tentang Filsafat Pendidikan Dewasa Ini", dalam Sindhunata (ed.), *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Yogyakarta, Kanisius, 2000).

¹⁹ Muhaimin et., al. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hal. 12.

²⁰ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung, Mizan, 1991, hal. 167).

²¹ Alex Lanur, "Dampak Konsep Filsaafaat Manusia Yang Bersifat Personalistik Pada Pendidikan", dalam Sindhunata (ed.), *Menggagas ...*, *op. cit.*, hal. 188.

²² Lihat Andreas Harefa, *Menjadi Manusia Pembelajar*, (Jakarta, Kompas, 2001), hal. 141.

²³ *Ibid.*, hal.134-135.

²⁴ Alex Lanur, *Lot. Cit.*

²⁵ Lihat Anita Lee, *Cooperative Learning*, (Jakarta, Grasindo, 2002), hal. 12.

²⁶ Alex Lanur, *op. cit.*, hal. 190.

²⁷ Lihat Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996), hal. 285.

²⁸ St. Kartono, *Menebus Pendidikan Yang tergadai: Catatan Refleksi Seorang Guru*, (Yogyakarta, Galang Press, 2002), hal. 158.

²⁹ Alex Lanur, *op. cit.*, hal. 192.

³⁰ Lihat M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, (Jakarta Bina Aksara, 1991), hal. 4.

³¹ Lihat Muhaimin, *Kontroversi Pemikiran Fazlurrahman: Study Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Cirebon, Pustaka Dinamika), 1999. hal. 103.

³² Samsul Nizar, *Dasar-Dasar Pendidikan Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001), hal., 176.

³³ Dalam surat Al-Anbya' ayat 30 misalnya, dikatakan yang artinya, “ Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudia Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak beriman “

³⁴ Misalnya, Einstein (1905-1911) menemukan teori kenisbian, teori relativitas. Dalton (1766-1844) menemukan dasar ilmu kimia yang ditekankan pada teori atom. Henry Becquerel (1852-1808), Curie (1859-1906) dan Thomson menemukan electron yang menggugurkan teori atom sebagai bagian terkecil yang tak dapat dibagi lagi. Lihat, Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan kurikulum : Teori dan Praktek*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hal. 66.

³⁵ Lihat Mohammad Ali, *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung, Sinar Baru, 1992), hal. 5.

³⁶ Lihat Muhaimin & Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, (Bandung, Trigendi Karya), hal. 211

³⁷ Seorang pendidik profesional dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal, antara lain, memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya, daan selalu melakukan pengembangan diri secara terus-menerus. Lihat Indra DJati Sidi, *op. cit.*, hal. 158.

³⁸ Lihat Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format pendidikan Nondikotomik*, (Yogyakarta, Gema Media), 2000, hal. 202-203.